

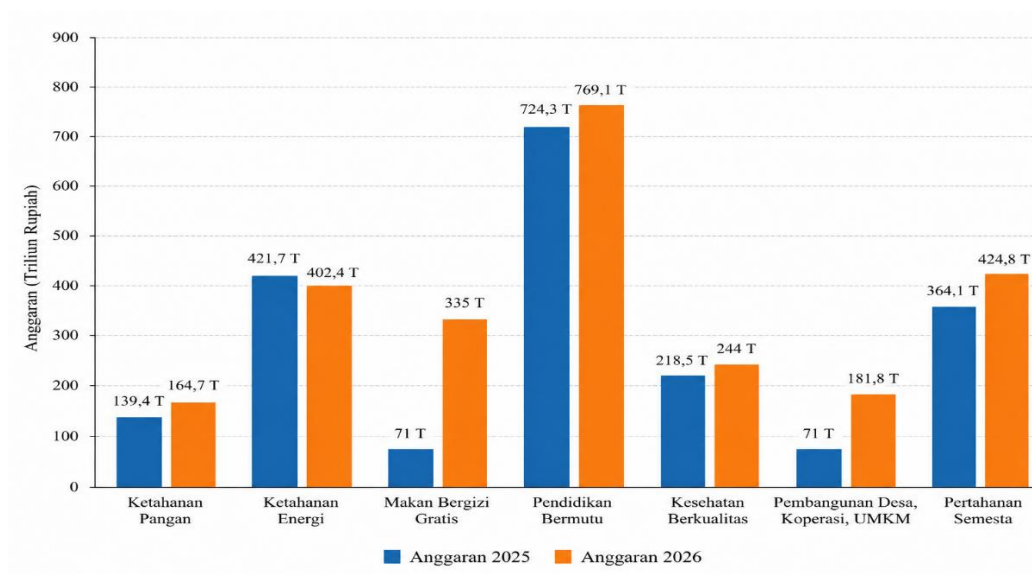
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal ekspansif telah menjadi instrumen utama yang ditempuh berbagai negara di dunia dalam merespons ketidakpastian ekonomi global pascapandemi COVID-19. Dalam konteks ini, pemerintah secara masif meningkatkan belanja negara guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, melindungi kelompok rentan, dan mempercepat pemulihan. Kondisi tersebut juga tercermin dalam pengelolaan kebijakan fiskal di Indonesia selama periode 2024–2026, ketika pemerintah meningkatkan peran belanja negara dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, perlindungan sosial, ketahanan energi, serta program prioritas pemerintah lainnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja negara, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi semakin penting, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pengeluaran pemerintah. Perubahan arah dan prioritas kebijakan fiskal tersebut turut memengaruhi dinamika APBN selama periode penelitian 2024-2026.

Berikut data dari Nota Keuangan mengenai anggaran program prioritas :



Gambar 1. 1 Perbandingan Anggaran Program Prioritas

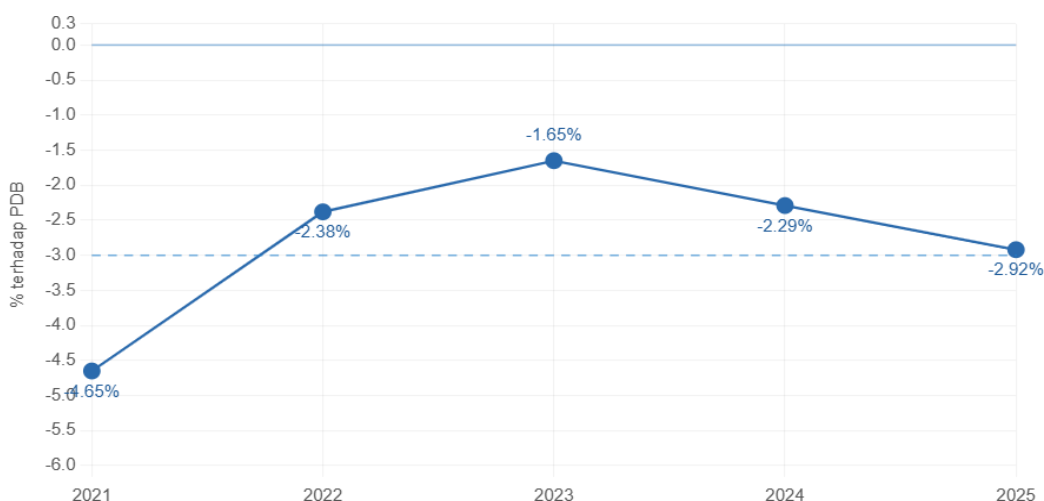
Dalam penelitian ini, berbagai program prioritas tersebut tidak dianalisis secara parsial, melainkan direpresentasikan melalui variabel pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebagai indikator intensitas ekspansi fiskal. Era ekspansi fiskal didefinisikan sebagai fase kebijakan di mana pemerintah secara aktif meningkatkan belanja negara secara signifikan. Penelitian ini menggunakan lima indikator operasional yang disusun berdasarkan sintesis konsep kebijakan fiskal ekspansif. Pertama, rasio defisit terhadap PDB yang membesar secara konsisten dari tahun ke tahun. Kedua, pertumbuhan belanja pemerintah yang secara konsisten melampaui rata-rata historisnya maupun pertumbuhan PDB. Ketiga, kesenjangan yang semakin melebar antara pertumbuhan belanja dan pertumbuhan penerimaan negara. Keempat, *fiscal impulse* yang bernilai positif, menandakan *stance* kebijakan fiskal semakin ekspansif. Kelima, terdapat *discretionary policy* berupa peluncuran program-program prioritas baru berbiaya besar yang bersifat multi tahun. Berdasarkan kelima parameter tersebut, tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai periode ekspansi fiskal. sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Parameter Ekspansi Fiskal

Parameter	Indikator	Kondisi 2023 (<i>baseline</i>)	Kondisi 2024- 2026 (Era Ekspansi)
Rasio defisit/PDB membesar	Defisit konsisten	1,65%	2,29% (2024) → 2,92% (2025)
Belanja>rata-rata historis	Pertumbuhan belanja > 5- 10% normal	Terkendali	+47,7% YoY Q1- 2026
Belanja>penerimaan	Kesenjangan melebar	Pajak +8,9% YoY	Pajak - 14,7% YoY
<i>Fiscal impulse</i> positif	<i>Stance</i> semakin ekspansif	Negatif	Positif 2024- 2025
<i>Discretionary policy</i>	Program	Tidak ada	MBG

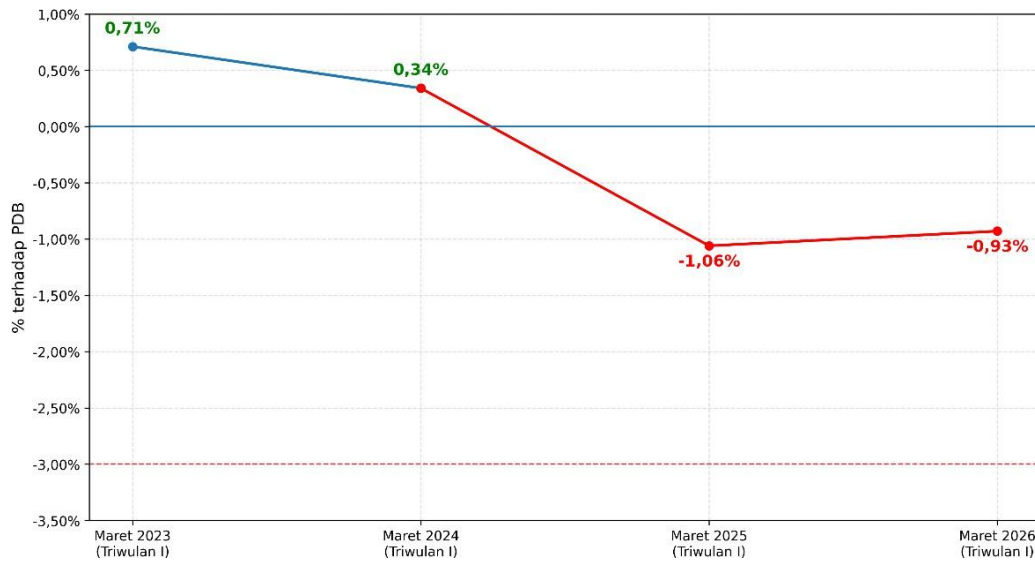
	prioritas	besar	
--	-----------	-------	--

Sebelum memasuki era ekspansi fiskal yang menjadi fokus penelitian ini, pada tahun 2023 Indonesia berada di puncak konsolidasi fiskal pascapandemi dengan defisit APBN berada di angka 1,65%, sebuah angka yang jauh dari batas maksimum defisit. APBN sempat mencatat surplus Rp75,7 triliun pada April 2024, namun berbalik menjadi defisit Rp77,3 triliun dua bulan berselang, dan terus melebar hingga mencapai defisit Rp507,9 triliun atau setara 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun 2024 (Kemenkeu, APBN KiTa Desember 2024). Kondisi semakin memburuk pada tahun 2025, di mana defisit APBN tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% PDB, yang artinya hanya 0,08% dari ambang batas maksimum defisit 3% PDB yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Kemenkeu, APBN KiTa Januari 2026).



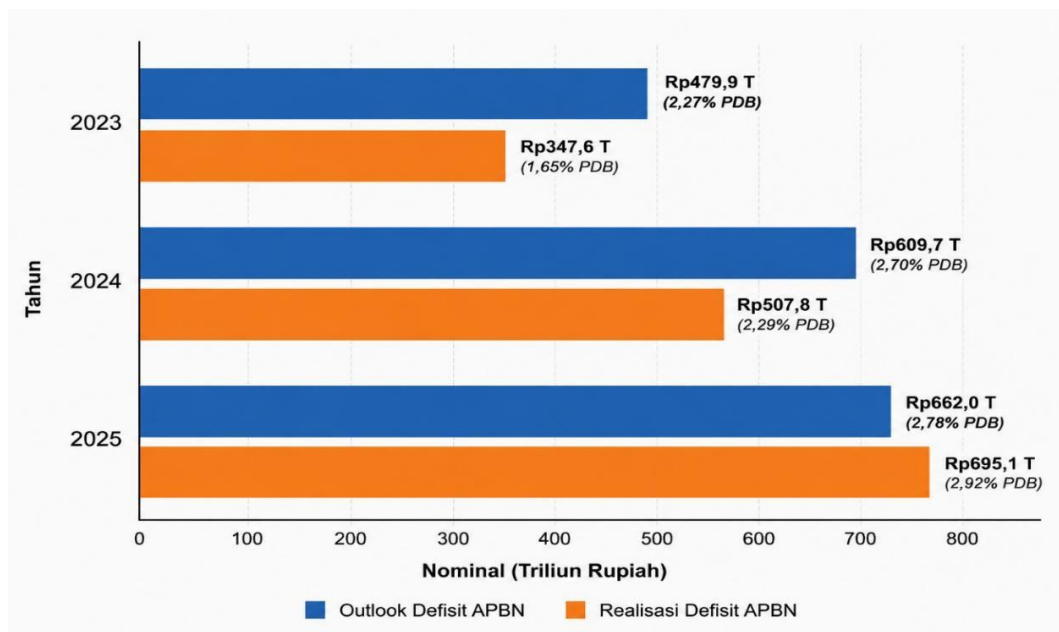
Gambar 1. 2 Diagram Garis Saldo APBN Tahunan
Sumber resmi APBN KiTa dan berita ANTARA News Januari 2025

Data dibawah ini menunjukkan pada Triwulan I tahun 2025 saldo APBN telah mencapai defisit 1,06% dan tahun 2026 defisit APBN telah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB, sebuah angka yang jauh lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dan 2024. (Kemenkeu, APBN KiTa April 2026).



Gambar 1. 3 Diagram Garis Saldo APBN Triwulan
Sumber resmi APBN KiTa

Fenomena penelitian diperkuat juga dari data APBN KiTa yang membuktikan pada tahun 2025 realisasi APBN melebihi perkiraan/*outlook* yang disusun pemerintah yang artinya terdapat gejala pengeluaran yang maksimal yang tidak diimbangi dengan penerimaan, seperti yang tertera dalam diagram batang dibawah ini:



Gambar 1. 4 Diagram Batang *Outlook* vs Realisasi APBN
Sumber resmi APBN KiTa

Pengelolaan APBN yang sehat mensyaratkan defisit yang terkendali di bawah 3% PDB sesuai amanat perundang-undangan, dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan yang konsisten, belanja yang efisien serta berorientasi pada hasil pembangunan, serta inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Kondisi ideal ini tercapai secara gemilang pada tahun 2023, di mana APBN berhasil mencatat defisit hanya sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% dari PDB jauh di bawah batas legal. Kondisi ideal yang sempat terjadi pada tahun 2023 ini mulai bergeser secara drastis memasuki periode ekspansi fiskal 2024-2026. Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar -8,2% yoy pada Triwulan I-2024, -7,0% yoy pada Triwulan II-2024, dan -1,4% yoy pada Triwulan III-2024 dan baru tumbuh positif 3,6% yoy pada Triwulan IV-2024 setelah pemerintah melakukan efisiensi belanja (Kemenkeu, APBN KiTa Januari 2025). Di sisi lain, belanja pemerintah pusat justru mengalami akselerasi yang sangat agresif, tumbuh 47,7% yoy pada Triwulan I-2026 seiring dengan implementasi program-program prioritas nasional, angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan belanja historis Indonesia yang berkisar 5-10% per tahun. Sementara penerimaan perpajakan pada periode yang sama tumbuh 14,2% yoy masih lebih lambat dari laju belanja (Kemenkeu, APBN KiTa April 2026). Seluruh angka yang disajikan dalam uraian fenomena ini bersumber dari publikasi resmi APBN KiTa yang umumnya disajikan dalam format realisasi kumulatif (*Year-to-Date*), triwulanan, maupun tahunan. Sementara itu, data yang digunakan dalam analisis regresi (Bab 4) merupakan data bulanan murni hasil dekumulasi. Oleh karena itu, terdapat perbedaan besaran antara angka fenomena dan angka analisis. Proses konversi dan justifikasinya dijelaskan pada sub-bab 3.4.1.

Kesenjangan antara penerimaan yang tertekan dan belanja yang melonjak ini menghasilkan dinamika saldo APBN yang sangat berfluktuasi, bahkan berulang kali berbalik arah dalam rentang waktu yang singkat dalam satu tahun anggaran yang sama. Pada dimensi inflasi, Indonesia bahkan mencatat deflasi sebesar -0,09% yoy pada Februari 2025, sebuah fenomena langka yang terjadi secara bersamaan dengan tekanan defisit yang tinggi, hal ini menunjukkan kompleksitas interaksi antar variabel makroekonomi terhadap kondisi fiskal yang patut untuk diteliti

secara empiris pada periode ini (BPS, 2025).

Dinamika fiskal yang begitu bergejolak ini membawa dampak berlapis bagi pemerintah maupun masyarakat jika diabaikan terus menerus yaitu tekanan defisit yang terus melebar dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang dan mempersempit ruang fiskal untuk kebijakan masa depan, kesinambungan layanan publik dan program perlindungan sosial menjadi terancam apabila kapasitas fiskal terganggu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, postur APBN terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran, di mana selisih antara pendapatan dan belanja menentukan posisi surplus atau defisit. Dalam penelitian ini, tiga variabel utama diidentifikasi sebagai faktor yang secara teoritis berpengaruh terhadap dinamika saldo APBN. Pertama, pertumbuhan penerimaan perpajakan, dalam teori Tax Buoyancy, penerimaan pajak bersifat elastis terhadap perkembangan aktivitas ekonomi, di mana pertumbuhan basis pajak yang kuat akan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara (International Monetary Fund, 2014). Perpajakan menyumbang lebih dari 80% total penerimaan negara, menjadikannya komponen terpenting di sisi pendapatan APBN, sehingga fluktuasi pertumbuhannya secara langsung memengaruhi posisi saldo fiskal (Kemenkeu, 2024). Kedua, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, Teori Keynesian menegaskan bahwa belanja pemerintah adalah instrumen ekspansi fiskal yang mendorong permintaan agregat, namun peningkatan belanja yang tidak diimbangi penerimaan akan secara langsung memperburuk posisi saldo APBN (Keynes, 1936). Perspektif ini diperkuat oleh Wagner's Law yang memprediksi kecenderungan peningkatan belanja pemerintah seiring pembangunan ekonomi, sehingga pengelolaan belanja menjadi tantangan fiskal yang bersifat struktural (Wagner, 1883 dalam Solikin, 2018). Ketiga, inflasi, Teori Fisher Effect menegaskan inflasi memengaruhi saldo APBN melalui dua jalur yaitu dari sisi penerimaan, inflasi meningkatkan basis pajak nominal seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, namun dari sisi pengeluaran, inflasi meningkatkan beban belanja subsidi energi, pangan, dan belanja sosial yang pada akhirnya menekan posisi saldo APBN (Fisher, 1930). Secara teoritis, ketiga variabel ini membentuk hubungan kausal terhadap dinamika saldo APBN.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi defisit anggaran di Indonesia. Kusumasari & Soebagiyo (2024) meneliti faktor-faktor determinan defisit anggaran 2002–2022 menggunakan OLS dan menemukan nilai tukar berpengaruh signifikan, sementara inflasi tidak signifikan. Jurdil et al. (2024) menganalisis faktor penyebab defisit fiskal Indonesia periode 2000–2023 dengan memfokuskan pada variabel ekspor, impor, inflasi, dan nilai tukar, hasilnya menunjukkan bahwa ekspor, impor, dan nilai tukar berpengaruh signifikan, namun inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap defisit. Sementara Fridana (2023) dengan PAM data tahunan 1999–2020 justru menemukan inflasi berpengaruh signifikan. Adapun Sugiarti & Subiyantoro (2025) meneliti korelasi antara defisit fiskal dan inflasi di Indonesia periode 2000–2023, menemukan korelasi positif moderat yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Meskipun keempat penelitian tersebut memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang defisit fiskal Indonesia, terdapat sejumlah keterbatasan yang menciptakan celah penelitian yang signifikan.

Pertama, seluruh penelitian yang ada menggunakan data tahunan (annual data), sehingga tidak mampu menangkap dinamika saldo APBN yang berfluktuasi dalam skala bulanan sebagaimana yang terjadi pada periode 2024-2026, di mana saldo APBN dapat berbalik dari surplus ke defisit hanya dalam rentang dua bulan. Kedua, tidak ada penelitian yang menggunakan variabel pertumbuhan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan belanja pemerintah pusat dalam format persentase *Year-on-Year* (YoY) karena mayoritas menggunakan nilai absolut dalam satuan rupiah yang berpotensi menimbulkan masalah hubungan identitas akuntansi apabila dijadikan prediktor langsung dari saldo APBN. Ketiga, dan paling krusial, belum ada satupun penelitian yang mencakup periode era ekspansi fiskal pemerintahan Prabowo 2024-2026, yang merupakan fenomena fiskal paling aktual sehingga patut untuk diteliti secara empiris. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini, yaitu menganalisis secara empiris faktor-faktor penentu dinamika saldo APBN menggunakan data bulanan dengan variabel berbasis pertumbuhan YoY, pada konteks era ekspansi fiskal 2024-2026. Urgensi penelitian ini dilandasi oleh tiga pertimbangan mendasar yang saling menguatkan. Secara akademis, kekosongan literatur empiris tentang determinan

saldo APBN dalam kemampuan menangkap fase ekspansi fiskal agresif 2024–2026 menciptakan kebutuhan nyata akan penelitian yang mampu mengisi celah tersebut, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dalam menganalisis keuangan negara.

Kondisi defisit 2025 yang mencapai 2,92% PDB dan hampir menyentuh batas legal 3% menjadi sinyal peringatan dini (*early warning*) yang memerlukan respons kebijakan berbasis data empiris yang sahih. Secara temporal, penelitian yang dilakukan saat ini memiliki nilai aktualitas tinggi karena mengkaji fenomena yang sedang berlangsung. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pengambil kebijakan fiskal akan kehilangan landasan ilmiah yang diperlukan untuk mengelola APBN secara berkelanjutan di tengah ekspansi yang terus berlangsung. Adapun manfaat penelitian ini meliputi dua dimensi utama. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akuntansi sektor publik di Indonesia dengan kajian empiris berbasis data bulanan dan metode regresi linier berganda yang tervalidasi, serta dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada Kementerian Keuangan terkait variabel yang perlu mendapat prioritas pengelolaan, menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi pengawasan pelaksanaan APBN, dan memberikan informasi ilmiah bagi masyarakat tentang faktor-faktor yang secara nyata memengaruhi posisi keuangan negara.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian adalah realisasi APBN Indonesia secara agregat nasional dengan judul **“Analisis faktor-faktor yang memengaruhi saldo APBN pada era ekspansi fiskal periode 2024-2026”**. Penelitian ini menganalisis dinamika Saldo APBN untuk menangkap fluktuasi kinerja anggaran secara akurat dengan menggunakan pendekatan perubahan Saldo sebagai variabel dependen. Meskipun fenomena penelitian disajikan menggunakan nilai absolut saldo APBN sebagaimana dipublikasikan pemerintah, analisis empiris menggunakan perubahan saldo APBN (*Year-on-Year Difference*) sebagai proksi operasional variabel dependen. Pendekatan ini dipilih untuk mengurangi pengaruh pola musiman (*seasonality*) pada data bulanan sehingga hubungan antarvariabel dapat diestimasi

secara lebih akurat. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya bukti empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik tentang arah dan besaran pengaruh masing-masing variabel terhadap saldo APBN, beserta identifikasi faktor yang paling dominan, sehingga memberikan kontribusi ilmiah sekaligus implikasi kebijakan yang relevan bagi upaya menjaga kesinambungan fiskal Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan penerimaan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap saldo APBN Indonesia pada era ekspansi fiskal periode 2024-2026?
2. Apakah pertumbuhan belanja pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap saldo APBN Indonesia pada era ekspansi fiskal periode 2024-2026?
3. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap saldo APBN Indonesia pada era ekspansi fiskal periode 2024-2026?
4. Apakah pertumbuhan penerimaan perpajakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, dan inflasi bersama-sama berpengaruh terhadap saldo APBN Indonesia pada era ekspansi fiskal periode 2024-2026?
5. Faktor manakah di antara pertumbuhan penerimaan perpajakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, dan inflasi yang paling dominan memengaruhi saldo APBN Indonesia pada era ekspansi fiskal periode 2024-2026?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data realisasi APBN Pemerintah Pusat Republik Indonesia secara agregat nasional yang bersumber dari publikasi resmi Kementerian Keuangan melalui APBN KiTa, serta data inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini tidak menggunakan data proyeksi atau estimasi.
2. Periode penelitian dibatasi menggunakan data bulanan yang mencakup periode Januari 2024 hingga Mei 2026, dengan total 29 observasi. Dari jumlah tersebut,

dilakukan penanganan terhadap data outlier sebagai bagian dari pemenuhan asumsi klasik, sehingga sampel akhir yang dianalisis berjumlah 28 observasi.

3. Penelitian ini hanya mengkaji tiga variabel independen, yaitu pertumbuhan penerimaan perpajakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, dan inflasi, serta satu variabel dependen yaitu saldo APBN. Variabel-variabel lain yang secara teoritis juga dapat memengaruhi saldo APBN tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
4. Pengukuran variabel dalam penelitian menggunakan proksi sebagai berikut :
 - 1) Variabel Saldo APBN diukur menggunakan *Year-on-Year Difference* realisasi saldo APBN bulanan murni dalam satuan Rp Triliun.
 - 2) Variabel Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan diukur menggunakan persentase pertumbuhan *Year-on-Year* (% YoY) realisasi penerimaan perpajakan bulanan murni.
 - 3) Variabel Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat diukur menggunakan persentase pertumbuhan *Year-on-Year* (% YoY) realisasi belanja pemerintah pusat bulanan murni.
 - 4) Variabel Inflasi diukur menggunakan laju inflasi umum IHK nasional secara *Year-on-Year* (% YoY) yang dipublikasikan oleh BPS setiap bulan.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan penerimaan perpajakan terhadap saldo APBN Indonesia periode 2024–2026.
2. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan belanja pemerintah pusat terhadap saldo APBN Indonesia periode 2024–2026.
3. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh inflasi terhadap saldo APBN Indonesia periode 2024–2026.
4. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan penerimaan perpajakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, dan inflasi secara simultan terhadap saldo APBN Indonesia periode 2024–2026.
5. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor yang paling dominan di antara

pertumbuhan penerimaan perpajakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat, dan inflasi dalam memengaruhi saldo APBN Indonesia periode 2024–2026.

1.4.2 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan analisis empiris keuangan negara dan dinamika APBN. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi pengembangan ilmu akuntansi yang tidak hanya terbatas pada tataran mikro perusahaan, tetapi juga menyentuh dimensi makro keuangan negara.
2. Penelitian ini menguji relevansi teori Keynesian, Wagner's Law, Tax Buoyancy, dan Fisher Effect dalam konteks ekspansi fiskal Indonesia periode 2024-2026. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada validasi teori-teori tersebut dalam konteks negara berkembang yang sedang menjalankan ekspansi fiskal berskala besar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi berbasis bukti empiris kepada Kementerian Keuangan mengenai faktor yang paling dominan memengaruhi saldo APBN, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih *prudent* dan berkelanjutan di era ekspansi.
4. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang faktor-faktor yang secara nyata memengaruhi kondisi keuangan negara, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih cerdas dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara sebagai wujud akuntabilitas publik.